

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia, 2018
- A.S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia)*, Jakarta, 2019
- H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Hidayat, *Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2019
- Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta, Prenada Media, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008

Ramdani Wahyu dkk, *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)*, Bandung, Universitas Gunung Djati

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Sarwoto, *Dasar-dasar organisasi dan Management*. Ghala Indonesia, Jakarta, 1990

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigress Press, Gresik, 2022

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*

Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta, Sinar Grafika

Widodo Dw Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta, Kencana, 2024

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

JURNAL

- Apsari, Ajeng Dwi, *Efektivitas Pelayanan Publik Satuan Penyelenggara Administtasi SIM dalam Pelayanan SIM Daring di Kota Tarakan*, Skripsi, Universitas Mihammadiyah Malang, 2020
- Annisa Dita Setiawan, dkk, *Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2, No. 2, 2021
- Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 2, Juli 2015
- Berutu, *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan e-Court*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol. 05, No. 01, 2020
- Lundeto, *Efektivitas Relas Panggilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung*, Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 1, No. 2
- Muhammad Irsyad Fattah, dkk, *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali*, Jurnal Qisthosia Vol. III, No. 1, 2022
- Mumtaza Azzahiroh, dkk, *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, November 2020
- Mela Saputri & Jumiati, *Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping*, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1, Tahun 2023

Naylla, Fakhrian dan Artaji, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam hal E-Summons di Pengadilan Agama Kota Bandung*

Nindy Sulitya Widiastiani, *Pengadilan Relasi Industri (The Industrial Relations Court Jurisdiction in the case of Company againsts Directors,* Jurnal Yudisial, Vol 12, No. 2, 2019

Nur Solikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung,* Jurnal Rechtsvinding, 2017

Septiar dan Harahap, *“Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Mahkamah Agung RI Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Tingkat.”* Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, 2019

Wantu F, *Antinomi oleh Penegakkan Hukum oleh Hakim,* Jurnal Mimbar Hukum No. 19, Vol. 3, 2007

MEDIA DARING

E-Court Mahkamah Agung RI, Electronics Justice System, Mahkamah Agung RI, Jakarta, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Elyn Purnamasari, *Dasar Hukum Pelayanan e-Court,* diakses pada <https://www.pa-kuningan.go.id/e-court/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

Heru, *Dasar Hukum e-Court*, diakses pada <https://www.pasurabaya.go.id/pages/e-court>

Mahkamah Agung RI, melalui <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court (The Economic Justice System)*, Jakarta, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1039)